

Kritik Interseksional atas Representasi Moral dalam Teks Film *Budi Pekerti* Karya Wregas Bhanuteja

Leyla Aufa Nasywa Bobsaid, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Ririe Rengganis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan representasi moral perempuan dalam teks film *Budi Pekerti* yang dipengaruhi patriarki, kelas sosial, profesi guru, media digital, dan relasi kuasa; serta representasi moral perempuan, mekanisme pengawasan yang dibentuk institusi dan masyarakat, interseksi gender, kelas sosial, dan profesi guru yang menghasilkan ketidakadilan. Penelitian digunakan pendekatan kualitatif deskriptif berparadigma interpretatif dengan pendekatan objektif. Data berupa dialog, adegan, konflik, karakterisasi, dan unsur sinematik dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan menggunakan teori interseksionalitas Kimberlé Crenshaw, teori patriarki, moral sebagai konstruksi sosial serta teori pendidikan kritis. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa norma patriarki direproduksi melalui prosedur kelembagaan yang mengawasi guru perempuan lebih ketat dibandingkan guru laki-laki. Kelas sosial memperbesar kerentanan Bu Prani karena tanggung jawab ekonomi membatasi ruang pilihan dan keberaniannya menghadapi stigma. Media digital mengubah tubuh, ekspresi, suara, dan emosi perempuan menjadi objek pengawasan publik melalui representasi terpotong. Film juga dibedakan peran guru perempuan sebagai simbol moral dan guru laki-laki sebagai pengelola institusi. Penelitian disimpulkan bahwa moralitas perempuan merupakan konstruksi interseksional yang dihasilkan patriarki, kelas sosial, profesi, media digital, dan relasi kuasa. Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan film lain dan mengkaji respons penonton secara mendalam agar memperoleh pemahaman lebih komprehensif mengenai penerimaan sosial terhadap representasi tersebut.

Keywords: *Budi Pekerti*, Interseksionalitas, Kelas Sosial, Kimberlé Crenshaw, Moralitas, Patriarki

Pendahuluan

Film merupakan teks yang membangun makna melalui hubungan antara dialog, adegan, karakter, konflik, alur, dan unsur visual sehingga tidak dapat dipahami sebagai cerminan langsung realitas sosial. Film memiliki posisi yang lebih luas daripada sekadar media hiburan. Film dapat menjadi media komunikasi yang membawa nilai budaya, humanisme dan identitas (Sufa, *et al.*, 2020). Representasi dalam film selalu dipengaruhi perspektif, nilai, dan ideologi yang menentukan bagaimana suatu persoalan ditampilkan dan dimaknai. Penelitian ini ditempatkan film *Budi Pekerti* karya Wregas Bhanuteja sebagai objek kajian untuk menganalisis representasi moral perempuan melalui narasi, dialog, tindakan tokoh, konflik, ekspresi, dan elemen visual tanpa mengukur realitas sosial maupun respons penonton. Ketidakadilan terhadap perempuan terbentuk melalui relasi kuasa, norma gender, dan struktur sosial yang membatasi posisi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan (Homan, 2021). Perempuan menghadapi standar moral yang lebih ketat dibandingkan laki-laki, sementara persinggungan gender dengan kelas sosial, pekerjaan, dan identitas lain memperbesar kerentanan karena memengaruhi akses terhadap

sumber daya, kemampuan menghadapi stigma, serta posisi dalam struktur kekuasaan (Sabik, 2021).

Kajian terdahulu banyak dibahas ketidakadilan terhadap perempuan melalui perspektif feminisme dan interseksionalitas dengan fokus pada gender, kelas, ras, pekerjaan, relasi kuasa, opresi sistemik, representasi feminisme, resistensi patriarki, dan kekerasan berbasis gender (Brünig, *et al.*, 2024; Gqola, *et al.*, 2024). Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik diuraikan bagaimana *structural intersectionality*, *political intersectionality*, dan *representational intersectionality* membentuk standar moral terhadap profesi guru maupun menjadikan *Budi Pekerti* sebagai objek utama kajian (Esposito, 2024). Film *Budi Pekerti* (2023) diangkat persoalan moralitas, media sosial, budaya viral, dan penghakiman publik melalui tokoh Bu Prani, seorang guru bimbingan konseling yang mengalami tekanan setelah potongan video perselisihannya tersebar di media sosial. Penyebaran informasi tanpa konteks memengaruhi reputasi, karier, dan kehidupan keluarganya sekaligus memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi ruang pembentukan citra melalui komentar, interaksi pengguna, dan sirkulasi konten (Krisprimandoyo, *et al.*, 2024). Representasi media tidak sekadar menampilkan realitas, tetapi membentuk persepsi publik melalui pilihan visual dan simbol yang dapat memperkuat stereotip maupun menghilangkan agensi kelompok marginal (Farida, *et al.*, 2025). Relasi kuasa dalam film bekerja melalui institusi pendidikan, keluarga, masyarakat, dan ruang digital yang menentukan batas perilaku pantas serta menyimpang (Esposito, 2024). Pengawasan dan sanksi tidak hanya memengaruhi reputasi, tetapi juga mengancam pekerjaan dan kehidupan keluarga.

Penelitian ini digunakan kritik interseksional Kimberlé Crenshaw untuk menjelaskan bagaimana moralitas perempuan dikonstruksi, dinilai, dan dijadikan mekanisme pengawasan sosial. Moralitas dipahami sebagai konstruksi sosial yang diproduksi melalui keluarga, sekolah, media, dan opini publik. Patriarki membentuk standar moral, kelas sosial menentukan tingkat kerentanan, sedangkan profesi guru memperkuat tuntutan keteladanan. Pengalaman Bu Prani ditunjukkan bahwa diskriminasi tidak berasal dari satu identitas, tetapi dari persinggungan gender, kelas sosial, dan profesi guru yang menghasilkan overlapping oppression atau penindasan berlapis (Bixby, 2024). Interseksionalitas digunakan untuk mengkritik pendekatan yang hanya melihat diskriminasi melalui satu kategori identitas. *Structural intersectionality* dijelaskan bagaimana gender, profesi, dan kondisi ekonomi membatasi pilihan hidup Bu Prani (Bixby, 2024). *Political intersectionality* diperlihatkan benturan antara perannya sebagai guru, perempuan, istri, dan ibu yang membatasi ruang pembelaan dirinya (Fasang & Aisenbrey, 2022). Sementara itu, *representational intersectionality* ditunjukkan bahwa potongan video, komentar publik, dan stereotip gender membentuk citra Bu Prani sebagai perempuan emosional dan guru yang diragukan integritasnya (Gowda, 2024). Dengan demikian, diskriminasi dipahami sebagai hasil kerja simultan struktur sosial, kebijakan, representasi media, dan relasi kuasa; bukan sebagai akibat dari satu identitas tunggal.

Kerangka interseksional tersebut dipadukan dengan teori patriarki dari Sylvia Walby, Kate Millett, dan Bell Hooks. Walby menjelaskan bahwa patriarki bekerja melalui struktur negara, keluarga, budaya, dan dunia kerja (Aldossari & Chaudhry, 2024). Millett memandang patriarki sebagai sistem politik dan ideologi yang mempertahankan dominasi laki-laki melalui kontrol

terhadap tubuh, seksualitas, dan budaya (Dabaghi, *et al.*, 2023). Sementara itu, Bell Hooks melihat patriarki sebagai sistem kekuasaan yang direproduksi melalui proses sosialisasi dan membatasi perempuan maupun laki-laki (Rudan & Battistini, 2023). Ketiga perspektif tersebut dijelaskan bagaimana standar moral terhadap perempuan diproduksi dan dipertahankan dalam kehidupan sosial.

Penelitian ini juga pandangi moral sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi, budaya, diskursus, dan mekanisme pengawasan dalam institusi (Müller & Müller, 2023). Regulasi moral bekerja melalui aturan formal maupun informal yang menentukan perilaku yang dianggap sesuai. Untuk memperkuat analisis tersebut, penelitian digunakan teori pendidikan kritis yang memandang institusi pendidikan sebagai ruang reproduksi relasi kuasa. Foucault menjelaskan disiplin melalui pengawasan dan normalisasi (Capodivacca, *et al.*, 2024), Bourdieu menjelaskan reproduksi dominasi melalui kekerasan simbolik (Barker-Clarke, 2023), sedangkan Apple menunjukkan bahwa sekolah juga mentransmisikan nilai dan hubungan kekuasaan melalui kurikulum tersembunyi. Keseluruhan perspektif tersebut menjadi landasan untuk mengungkap bagaimana *Budi Pekerti* direpresentasikan moralitas perempuan sebagai hasil persinggungan patriarki, kelas sosial, profesi guru, media digital, dan relasi kuasa.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana teks film *Budi Pekerti* karya Wregas Bhanuteja merepresentasikan moralitas perempuan dalam persinggungan patriarki, kelas sosial, dan profesi guru, mendeskripsikan bagaimana relasi kuasa bekerja dalam membentuk, mengawasi, dan mengendalikan moralitas tokoh perempuan dalam teks film *Budi Pekerti* karya Wregas Bhanuteja, serta mendeskripsikan bagaimana interseksi gender, kelas sosial, dan profesi guru menghasilkan bentuk diskriminasi dan ketidakadilan terhadap tokoh perempuan dalam teks film *Budi Pekerti* karya Wregas Bhanuteja. Kebaruan penelitian terletak pada pembacaan moralitas sebagai arena interseksional tempat patriarki, kelas sosial, profesi guru, dan relasi kuasa bekerja bersamaan dalam membentuk penilaian serta ketidakadilan terhadap tokoh perempuan. Pembatasan ini menjaga analisis tetap berpusat pada konstruksi tekstual dan tidak menggeneralisasi temuan kepada masyarakat.

Metode

Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif untuk menganalisis representasi moral dalam teks film *Budi Pekerti* karya Wregas Bhanuteja melalui pendekatan objektif yang berfokus pada struktur internal karya. Film dipahami sebagai teks yang membangun makna melalui dialog, adegan, karakterisasi, konflik, alur, dan unsur sinematik seperti *framing*, *angle*, *lighting*, warna, *gesture*, ekspresi, *editing*, dan *mise-en-scène* (Faruk, 2012). Sumber data penelitian adalah film *Budi Pekerti* (2023), dengan data berupa dialog, adegan, konflik, karakterisasi, dan unsur visual yang dipilih secara purposif sesuai empat fokus penelitian, yaitu norma patriarki dalam sistem pendidikan, dampak kelas sosial terhadap pengalaman moral tokoh perempuan, patriarki sebagai alat kontrol atas tubuh dan moralitas perempuan, serta perbedaan peran guru laki-laki dan perempuan dalam menegakkan standar moral di sekolah.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasi dengan menonton film secara berulang, mentranskripsikan dialog, mengidentifikasi adegan, mencatat durasi, dan mengelompokkan data berdasarkan kategori penelitian. Setiap data diberi kode BP sesuai urutan kemunculan adegan dan disusun dalam instrumen pengumpulan data yang memuat kode, dialog, adegan, durasi, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian. Analisis data digunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Interpretasi dilakukan menggunakan teori interseksionalitas Kimberlé Crenshaw melalui *structural intersectionality*, *political intersectionality*, dan *representational intersectionality*, yang dipadukan dengan teori patriarki, moral sebagai konstruksi sosial, dan teori Pendidikan (Faruk, 2012). Analisis juga mempertimbangkan unsur sinematik untuk memperkuat pemaknaan representasi moral dalam film. Keabsahan data dijaga melalui ketekunan pengamatan, pembacaan berulang, kecukupan referensi teoretis, dan triangulasi teori sehingga hasil penelitian memiliki kredibilitas, konsistensi, dan keterlacakan analisis mengenai representasi moral perempuan dalam teks film *Budi Pekerti*.

Tabel 1. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian

No.	Kode Data	Data Dialog	Data Adegan	Durasi	Implementasi
1	BP 01	Bu Prani membimbing Daru melalui Zoom untuk merefleksikan dampak perundungan verbal terhadap Ningsih. Daru diminta mengulang kata-kata hinaan dan melakukan eksperimen refleksi menggunakan kecambah sebagai media pembelajaran.		00:30–01:47	Guru menerapkan disiplin restoratif melalui refleksi, bukan hukuman. Pembelajaran mengembangkan empati, tanggung jawab, kesadaran dampak perundungan verbal, kemampuan memperbaiki perilaku, serta pendidikan karakter berbasis pengalaman dan observasi ilmiah sederhana.

Keterangan:

BP : *BUDI PEKERTI*

01 : Kode Adegan

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Moralitas Perempuan dalam Persinggungan Gender, Kelas Sosial, dan Profesi Guru

Konstruksi Moralitas Perempuan melalui Identitas Gender

Bu Prani dalam film *Budi Pekerti* direpresentasikan sebagai perempuan yang moralitasnya tidak berdiri sebagai karakter personal, melainkan dikonstruksi melalui persilangan gender, patriarki, kelas sosial, kondisi ekonomi, profesi, dan tanggung jawab domestik. Sebagai guru bimbingan konseling, istri, ibu, pencari nafkah, pengelola rumah tangga, pendamping suami, dan calon wakil kepala sekolah; setiap tindakan dan ekspresinya dinilai berdasarkan standar moral yang lebih ketat dibandingkan laki-laki. Perspektif feminisme interseksional Kimberlé Crenshaw menjelaskan bahwa pengalaman tersebut tidak dapat dipahami hanya melalui kategori gender karena berbagai struktur dominasi bekerja secara simultan membentuk kerentanan yang khas (Crenshaw, 2010). Posisi Bu Prani sebagai perempuan dengan keterbatasan ekonomi, rumah kontrakan, beban utang, tanggungan pengobatan suami, dan ambisi karier memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai tindakannya; tetapi juga kelayakannya sebagai perempuan, istri, ibu, guru, dan calon pemimpin sekolah.

Pernyataan Bu Prani

Kata-kata ini terus terngiang di kepala Ningsih terus-menerus (Budi Pekerti, 2026).

Hal ini ditunjukkan bahwa ia mengajarkan moral melalui empati dan kesadaran atas dampak psikologis kekerasan verbal. Dalam perspektif feminisme, tindakan tersebut sekaligus mereproduksi konstruksi perempuan sebagai penjaga relasi sosial dan pengelola emosi. Moralitas perempuan sering dikaitkan dengan etika kepedulian, kesabaran, kelembutan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Akibatnya, profesionalisme Bu Prani tidak hanya diukur dari kompetensi pedagogis, tetapi juga dari kemampuannya memenuhi standar feminitas normatif. Representasi ini bersifat ambivalen karena di satu sisi menegaskan agensi dan otoritas moralnya, tetapi di sisi lain memperkuat anggapan bahwa perempuan secara alamiah bertanggung jawab atas kesejahteraan emosional orang lain. Pandangan tersebut sejalan dengan bell hooks yang menjelaskan bahwa patriarki direproduksi melalui sosialisasi peran gender sehingga perempuan menginternalisasi tanggung jawab merawat dan menjaga harmoni sosial (Rudan & Battistini, 2023). Kondisi ini juga berkaitan dengan konsep *hidden curriculum* Michael Apple yang menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga norma mengenai guru perempuan yang santun, stabil, sabar, dan tidak menampilkan emosi berlebihan.

Kontradiksi tersebut tampak ketika Bu Prani berkata

Bapak jangan kurang ajar ya, Pak, dan jaga mulutnya ya, Mas (Budi Pekerti, 2026).

Ketegasan itu merupakan respons terhadap pelecehan verbal, tetapi budaya patriarkal memisahkan ekspresi tersebut dari konteksnya dan mengonstruksinya sebagai bukti bahwa ia

emosional. *Representational intersectionality* dijelaskan bahwa representasi digital semacam ini tidak berhenti pada opini publik, tetapi dapat memengaruhi reputasi, karier, pendapatan, dan peluang jabatan. Dengan demikian, *representational intersectionality* berkaitan langsung dengan *structural intersectionality* karena bias representasi menghasilkan konsekuensi material terhadap posisi profesional dan ekonomi perempuan. Temuan ini sekaligus menguatkan kritik Crenshaw terhadap *essentialism*, yaitu anggapan bahwa semua perempuan mengalami penindasan dengan cara yang sama. Pengalaman Bu Prani berbeda dari perempuan yang memiliki keamanan ekonomi, rumah sendiri, akses kesehatan memadai, atau pekerjaan tanpa tuntutan keteladanan publik. Meskipun demikian, perspektif feminisme interseksional tidak memandang Bu Prani sebagai korban pasif. Ia tetap memiliki agensi melalui keberaniannya membimbing siswa, mengelola keluarga, mempertahankan pengobatan suami, mencari nafkah, dan melawan ketidakadilan; meskipun seluruh pilihan tersebut berlangsung dalam batasan struktur patriarki dan ekonomi.

Secara keseluruhan, film *Budi Pekerti* direpresentasikan moralitas perempuan sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh relasi gender dan kekuasaan. Bu Prani dianggap bermoral ketika sabar, empatik, merawat suami, membimbing siswa, memenuhi kebutuhan keluarga, dan menjaga citra profesinya. Ketika ia marah demi mempertahankan keadilan, masyarakat mengabaikan substansi protesnya, dan memusatkan perhatian pada ekspresi emosionalnya sehingga moralitas perempuan diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan norma gender. Patriarki, kelas sosial, profesi guru, kondisi ekonomi, dan media digital saling berkelindan membentuk pengawasan terhadap identitas Bu Prani sebagai perempuan, istri, ibu, guru, pencari nafkah, dan calon pemimpin sekolah. Kondisi ini sesuai dengan konsep interseksionalitas Crenshaw (Crenshaw, 2010), teori patriarki Sylvia Walby yang menekankan keterhubungan struktur keluarga, pekerjaan, ekonomi, budaya, dan institusi (Aldossari & Chaudhry, 2024), pemikiran Bell Hooks mengenai reproduksi patriarki melalui sosialisasi dan internalisasi norma gender (Rudan & Battistini, 2023), dan perspektif Kate Millett tentang dominasi patriarki melalui budaya, ideologi, pembatasan suara perempuan, dan normalisasi tanggung jawab domestik (Dabaghi, *et al.*, 2023). Film ini pada akhirnya ditunjukkan bahwa moralitas Bu Prani merupakan arena pertarungan antara agensi perempuan dan struktur patriarki yang terus mengawasi, membatasi, dan menghukum perempuan melalui keseluruhan identitas sosialnya.

Konstruksi Moralitas melalui Persinggungan Kelas Sosial

Moralitas Bu Prani tidak dibangun hanya melalui identitasnya sebagai perempuan, tetapi melalui persinggungan berbagai struktur sosial yang saling memperkuat. Sebagai guru, calon wakil kepala sekolah, istri, sekaligus pencari nafkah keluarga, Bu Prani menghadapi tuntutan moral yang jauh lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Perspektif feminisme interseksional Kimberlé Crenshaw menjelaskan bahwa pengalaman perempuan tidak dapat dipahami melalui satu kategori identitas semata, melainkan melalui irisan berbagai struktur kekuasaan seperti gender, kelas sosial, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan institusi yang bekerja secara simultan membentuk pengalaman diskriminasi dan kerentanan. Dalam kerangka *structural intersectionality*, Crenshaw menjelaskan bahwa pekerjaan, kondisi ekonomi, pendidikan, layanan

publik, dan akses terhadap sumber daya merupakan struktur sosial yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan bentuk kerentanan yang berbeda bagi setiap perempuan (Crenshaw, 2010). Oleh karena itu, pengalaman Bu Prani sebagai guru tidak dapat dipisahkan dari tekanan ekonomi keluarganya, tanggung jawab sebagai istri, maupun kewajibannya mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Posisi tersebut diperlihatkan bahwa kerentanan perempuan bukan merupakan konsekuensi dari identitas gender semata, tetapi merupakan hasil persinggungan berbagai hambatan struktural yang membatasi ruang pilihan perempuan.

Bu Prani: Ya sudah, Mbak. Saya pesen lagi obatnya (Budi Pekerti, 2026).

Keputusan Bu Prani untuk tetap membeli obat bagi suaminya bukan sekadar tindakan kasih sayang, melainkan bentuk negosiasi perempuan terhadap berbagai tuntutan struktural yang dihadapinya. Keputusan tersebut diperlihatkan bagaimana perempuan harus mengambil tanggung jawab moral ketika berhadapan dengan keterbatasan ekonomi keluarga. Dalam perspektif Crenshaw, kondisi ekonomi, pekerjaan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan struktur yang saling memperkuat sehingga menghasilkan pengalaman kerentanan yang khas bagi perempuan (Crenshaw, 2010). Keputusan Bu Prani tidak lahir dari kebebasan memilih yang sepenuhnya otonom, tetapi dari ruang pilihan yang telah dibatasi oleh berbagai struktur sosial yang bekerja secara bersamaan.

Perspektif Sylvia Walby memperkuat analisis tersebut dengan menjelaskan bahwa patriarki tidak bekerja sebagai sistem tunggal, melainkan melalui berbagai struktur yang saling berhubungan, seperti keluarga, pekerjaan, ekonomi, budaya, dan institusi (Aldossari & Chaudhry, 2024). Dalam konteks Bu Prani, posisi sebagai perempuan pekerja tidak mengurangi tanggung jawab domestiknya. Sebaliknya, pekerjaan profesional justru berjalan berdampingan dengan kewajiban merawat suami, menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut ditunjukkan bahwa struktur patriarki tetap menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama kerja reproduktif meskipun mereka telah berpartisipasi dalam ranah publik.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Bell Hooks yang menegaskan bahwa patriarki direproduksi melalui proses sosialisasi sehingga berbagai peran gender dipahami sebagai sesuatu yang alamiah. Menurut Hooks, perempuan menginternalisasi tanggung jawab merawat keluarga sebagai kewajiban moral; sementara masyarakat menerima pembagian peran tersebut tanpa mempertanyakan ketimpangan yang melatarbelakanginya (Rudan & Battistini, 2023). Dengan demikian, keputusan Bu Prani untuk mengutamakan pengobatan suaminya menunjukkan bagaimana sistem patriarki bekerja melalui internalisasi nilai-nilai pengasuhan dan kepedulian yang dilekatkan kepada perempuan, bukan semata-mata melalui paksaan langsung.

Perempuan sering menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dengan memenuhi kewajiban merawat anggota keluarga. Diskursus moral berbasis gender membentuk perempuan sebagai subjek moral yang dinilai baik ketika mampu mendahulukan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam konteks tersebut, keputusan Bu Prani untuk tetap membeli obat mencerminkan bagaimana pilihan domestik perempuan selalu dipahami

sebagai keputusan moral, sehingga beban ekonomi keluarga secara tidak langsung berubah menjadi tanggung jawab moral perempuan.

Dari perspektif Kate Millett, kondisi tersebut diperlihatkan bahwa patriarki mempertahankan dominasinya melalui mekanisme budaya dan ideologi yang menormalisasi pembagian tanggung jawab berdasarkan gender. Perempuan ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keberlangsungan keluarga, sementara pengorbanan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan alamiah. Millett menegaskan bahwa patriarki tidak hanya bekerja melalui tindakan diskriminatif secara langsung, tetapi juga melalui proses sosialisasi, normalisasi, dan reproduksi nilai budaya yang membatasi posisi perempuan dalam kehidupan sosial (Dabaghi, *et al.*, 2023).

Temuan ini ditunjukkan bahwa moralitas Bu Prani tidak dapat dipahami sebagai karakter personal semata. Moralitas tersebut dibentuk melalui persinggungan gender, kelas sosial, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan struktur patriarki yang saling berinteraksi. Perspektif feminisme interseksional diperlihatkan bahwa perempuan menghadapi bentuk penindasan yang berbeda sesuai dengan posisi sosial dan material yang mereka tempati (Crenshaw, 2010). Oleh karena itu, keputusan Bu Prani untuk mengutamakan keberlangsungan pengobatan suaminya bukan hanya mencerminkan kepedulian personal, tetapi juga menunjukkan bagaimana struktur patriarki dan ketimpangan sosial membentuk ruang pilihan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Konstruksi Moralitas melalui Profesi Guru

Identitas profesional Bu Prani sebagai guru tidak dapat dipisahkan dari posisinya sebagai istri sekaligus pencari nafkah keluarga. Perspektif feminisme interseksional Kimberlé Crenshaw menjelaskan bahwa pengalaman perempuan dibentuk melalui persinggungan berbagai struktur sosial, seperti pekerjaan, kondisi ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, dan institusi, yang bekerja secara simultan dalam menghasilkan bentuk kerentanan tertentu (Crenshaw, 2010). Dalam konteks tersebut, profesi guru tidak hanya menjadi identitas pekerjaan, tetapi juga menjadi sumber tuntutan ekonomi dan moral yang harus dipenuhi secara bersamaan. Dengan demikian, pengalaman Bu Prani menunjukkan bahwa perempuan menghadapi konsekuensi yang lebih kompleks ketika berbagai struktur sosial saling beririsan dan membatasi ruang pilihannya.

Pak Didik	: Aku bisnis yo gagal terus... akik gagal, cupang gagal... enok nang psikolog, nang psikiater duwite entek.
Bu Prani	: Konseling iku penting loh, Pak.
Bu Prani	: Aku dipilih jadi wakas (Budi Pekerti, 2026).

Keberhasilan profesional Bu Prani tidak lagi dimaknai sebagai pencapaian karier yang bersifat individual, melainkan sebagai strategi untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarga. Posisi sebagai calon wakil kepala sekolah menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga sekaligus menjamin keberlanjutan pengobatan suaminya. Perspektif *structural intersectionality* dijelaskan bahwa pengalaman perempuan selalu dipengaruhi oleh persinggungan pekerjaan, kemiskinan, layanan kesehatan, dan akses terhadap sumber daya, sehingga pilihan yang diambil perempuan merupakan hasil negosiasi terhadap

berbagai hambatan struktural, bukan semata-mata keputusan yang sepenuhnya bebas (Crenshaw, 2010). Dalam kondisi tersebut, identitas Bu Prani sebagai guru dan pencari nafkah bekerja secara bersamaan membentuk pengalaman sosialnya sebagai perempuan.

Temuan ini juga ditunjukkan bahwa keberhasilan profesional perempuan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial-ekonomi yang melingkupinya. Kegagalan memperoleh posisi struktural tidak hanya berdampak terhadap perkembangan karier, tetapi juga terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga. Perspektif Crenshaw menjelaskan bahwa perempuan mengalami bentuk kerentanan yang berbeda ketika tekanan ekonomi, pekerjaan, dan institusi bekerja secara bersamaan sehingga ruang pilihan mereka menjadi semakin terbatas (Crenshaw, 2010). Oleh karena itu, keputusan Bu Prani untuk mengejar jabatan wakil kepala sekolah tidak dapat dipahami semata sebagai ambisi profesional, melainkan sebagai respons terhadap berbagai struktur sosial yang membatasi alternatif tindakan yang tersedia baginya.

Perspektif Sylvia Walby memperkuat temuan tersebut dengan menjelaskan bahwa patriarki bekerja melalui struktur keluarga, pekerjaan, ekonomi, budaya, dan institusi yang saling berhubungan (Aldossari & Chaudhry, 2024). Pengalaman Bu Prani memperlihatkan bahwa ruang domestik dan ruang profesional tidak pernah benar-benar terpisah. Tanggung jawab sebagai istri yang mendampingi suami dengan gangguan bipolar berjalan bersamaan dengan tuntutan profesional sebagai guru dan calon wakil kepala sekolah. Kondisi tersebut ditunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menghadapi beban ganda, tetapi juga menghadapi berbagai tuntutan moral yang berasal dari struktur patriarki yang beroperasi secara bersamaan di lingkungan keluarga maupun institusi. Dengan demikian, patriarki tidak hanya mengatur pembagian peran gender, tetapi juga membentuk distribusi tanggung jawab yang menempatkan perempuan sebagai penyangga utama keberlangsungan keluarga.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Bell Hooks yang memandang patriarki sebagai sistem sosial yang direproduksi melalui proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai gender sehingga membentuk perilaku seluruh anggota keluarga (Rudan & Battistini, 2023). Dalam konteks penelitian ini, kegagalan ekonomi yang dialami Pak Didik memperlihatkan bahwa patriarki juga membebani laki-laki melalui tuntutan maskulinitas sebagai pencari nafkah utama. Namun demikian, konsekuensi terbesar tetap dialami Bu Prani karena ia harus mengambil alih tanggung jawab ekonomi, menjaga stabilitas keluarga, sekaligus mempertahankan profesionalismenya sebagai guru. Temuan ini ditunjukkan bahwa patriarki tidak hanya menghasilkan ketimpangan relasi gender, tetapi juga menciptakan distribusi beban yang tidak seimbang sehingga perempuan tetap menjadi pihak yang memikul tanggung jawab terbesar dalam kehidupan keluarga.

Perspektif Kate Millett semakin menegaskan bahwa patriarki mempertahankan dominasinya melalui mekanisme budaya dan institusi sosial yang menormalisasi pembagian peran berdasarkan gender (Dabaghi, *et al.*, 2023). Perempuan diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keberlangsungan hubungan keluarga, sementara pengorbanan tersebut diterima sebagai sesuatu yang alamiah. Dalam pengalaman Bu Prani, tidak terdapat paksaan yang bersifat langsung untuk mengambil alih tanggung jawab ekonomi maupun emosional keluarga. Akan tetapi, proses sosialisasi budaya membuat tanggung jawab tersebut dipahami sebagai kewajiban moral

perempuan (Dabaghi, *et al.*, 2023). Kondisi ini ditunjukkan bahwa dominasi patriarkal bekerja secara halus melalui reproduksi nilai dan ideologi yang membentuk penerimaan terhadap ketimpangan peran gender dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian juga ditunjukkan bahwa profesi guru tidak membebaskan perempuan dari tuntutan domestik. Sebaliknya, identitas profesional justru memperluas tanggung jawab moral yang harus dipenuhi. Perempuan sering menghadapi diskursus moral yang menempatkan kewajiban merawat keluarga sebagai ukuran utama moralitasnya. Akibatnya, keberhasilan profesional perempuan terus dinegosiasikan dengan tanggung jawab domestik yang dilekatkan kepadanya. Dalam konteks Bu Prani, jabatan sebagai guru dan calon wakil kepala sekolah tidak dipahami semata sebagai identitas profesional, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga keberlangsungan keluarga. Temuan ini diperlihatkan bahwa moralitas perempuan dibentuk melalui persinggungan gender, kelas sosial, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan struktur patriarki yang saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif feminisme interseksional Kimberlé Crenshaw, moralitas perempuan bukanlah kualitas yang melekat secara alami pada diri perempuan, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk melalui persinggungan berbagai struktur kekuasaan (Crenshaw, 2010). Perempuan tidak dinilai hanya berdasarkan tindakan yang dilakukannya, tetapi juga berdasarkan posisi sosial yang ditempatinya sebagai perempuan, anggota kelas sosial tertentu, pekerja, maupun individu yang hidup dalam kondisi ekonomi tertentu, karena berbagai identitas tersebut saling berinteraksi, standar moral yang dikenakan kepada perempuan menjadi lebih kompleks dibandingkan laki-laki.

Relasi Kuasa dalam Pembentukan dan Pengawasan Moralitas Tokoh Perempuan

Relasi kuasa dalam film *Budi Pekerti* dibentuk melalui keterhubungan keluarga, institusi pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, dan masyarakat. Kekuasaan terhadap perempuan tidak selalu hadir dalam bentuk larangan atau kekerasan, tetapi melalui pengawasan sosial, penilaian moral, tuntutan kepatuhan, dan normalisasi peran gender yang mengendalikan ucapan, tindakan, emosi, serta keputusan hidup perempuan. Oleh karena itu, moralitas Bu Prani merupakan konstruksi sosial yang lahir dari persinggungan gender, profesi guru, kelas sosial, kondisi ekonomi, posisi dalam keluarga, dan norma patriarki (Crenshaw, 2010). Perspektif feminisme interseksional Crenshaw menegaskan bahwa pengalaman perempuan dibentuk oleh interaksi berbagai identitas dan struktur dominasi, sehingga Bu Prani dinilai sekaligus sebagai perempuan, guru, istri, ibu, pencari nafkah, dan figur publik. Persinggungan identitas tersebut menyebabkan kegagalan dalam satu peran dapat memengaruhi penilaian terhadap peran lainnya.

Sebagai guru, Bu Prani menjalankan peran membentuk moral peserta didik yang tercermin dalam pernyataannya,

Kata-kata ini terus terngiang di kepala Ningsih terus-menerus (Budi Pekerti, 2026).

Moralitas dipahami sebagai kesadaran atas dampak tindakan terhadap orang lain melalui penanaman empati, tanggung jawab, dan refleksi moral. Perkembangan moral terbentuk melalui internalisasi nilai, norma, peran sosial, dan negosiasi terhadap harapan masyarakat (Carpendale,

et al., 2021). Namun, otoritas profesional tersebut juga melahirkan standar moral ganda karena masyarakat tidak hanya menilai kompetensinya sebagai guru, tetapi juga keberhasilannya sebagai istri, ibu, dan pengelola keluarga. Identitas profesional perempuan akhirnya memperluas ruang penilaian terhadap kehidupan pribadinya.

Tekanan tersebut semakin kuat ketika Bu Prani memutuskan melanjutkan pengobatan suaminya dengan mengatakan

Ya sudah, Mbak, saya pesen lagi obatnya (Budi Pekerti, 2026).

Keputusan ini ditunjukkan konstruksi moral berbasis gender yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama perawatan keluarga. Moralitas perempuan dikonstruksikan melalui etika kepedulian, pengorbanan, dan kewajiban mendahulukan kebutuhan keluarga. Perspektif feminisme menegaskan bahwa pilihan Bu Prani tidak sepenuhnya lahir dari kebebasan individu karena dibatasi oleh kondisi ekonomi, kebutuhan pengobatan, tanggung jawab sebagai istri, dan tekanan keluarga. Crenshaw menyebut kondisi ini sebagai *structural intersectionality*, yaitu persinggungan gender dengan kemiskinan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan akses terhadap sumber daya yang membentuk kerentanan perempuan.

Kerentanan tersebut diperkuat oleh kelas sosial yang tercermin ketika pemilik kontrakan berkata

Pembayaran sudah telat dua bulan. Maksud saya, apakah tahun depan akan diperpanjang lagi apa nggak, Bu? dan Bu Prani menjawab, Masih kok, Pak, kita juga mau beli (Budi Pekerti, 2026).

Ketidakpastian ekonomi memengaruhi rasa aman, harga diri, dan posisi tawar Bu Prani sehingga ia tetap dituntut bersikap tenang di tengah keterbatasan. Persoalan ekonomi kemudian bergeser menjadi ukuran moral perempuan, terutama ketika ia diposisikan sebagai pengelola rumah tangga. Ketegangan tersebut semakin tampak saat Pak Didik berkata

Mending gawe bayar kontrakan (Budi Pekerti, 2026).

Pernyataan ini diperlihatkan konflik antara kebutuhan kesehatan mental dan keterbatasan ekonomi, sementara Bu Prani tetap memikul tanggung jawab mengatur keuangan, menjaga keberlanjutan pengobatan, dan mempertahankan stabilitas emosional keluarga. Kondisi tersebut ditunjukkan bahwa perempuan juga menjalankan kerja reproduktif dan emosional yang sering tidak diakui sebagai bentuk kerja. Perspektif Sylvia Walby menjelaskan bahwa patriarki bekerja melalui struktur keluarga, pekerjaan, budaya, ekonomi, dan institusi sosial yang saling berkaitan (Aldossari & Chaudhry, 2024). Dalam pengalaman Bu Prani, tuntutan domestik memengaruhi keputusan profesional; sementara identitas profesional digunakan untuk menilai kemampuannya mengelola keluarga. Film ini ditunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketidakmampuan Bu Prani menjalankan berbagai peran, melainkan pada ketidakadilan struktural yang mengharuskan perempuan memenuhi seluruh tuntutan tersebut secara bersamaan. Dengan

demikian, moralitas Bu Prani merepresentasikan moralitas perempuan yang dikonstruksi melalui persinggungan gender, kelas sosial, profesi, kondisi ekonomi, tanggung jawab domestik, dan struktur patriarki yang saling memperkuat.

Ketidakadilan Interseksional dalam Representasi Moral Tokoh Perempuan

Diskriminasi yang dialami Bu Prani dalam film *Budi Pekerti* merepresentasikan ketidakadilan berlapis yang lahir dari persinggungan gender, kelas sosial, profesi guru, kondisi ekonomi, serta posisinya sebagai istri dan ibu. Pengalaman tersebut tidak dapat dijelaskan melalui satu identitas karena berbagai struktur kekuasaan bekerja secara simultan membentuk kerentanan yang kompleks. Perspektif interseksionalitas menegaskan bahwa gender, kelas sosial, pekerjaan, keluarga, institusi, dan representasi publik saling berinteraksi dalam menghasilkan bentuk diskriminasi yang khas (Fasang & Aisenbrey, 2022). Crenshaw mengembangkan interseksionalitas sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana berbagai sistem dominasi saling beririsan sehingga pengalaman Bu Prani mencerminkan *overlapping oppression*. Diskriminasi yang dialaminya tidak hanya muncul karena ia perempuan, tetapi juga karena ia berperan sebagai guru, istri, ibu, pencari nafkah, pekerja perawatan, dan anggota keluarga dengan kondisi ekonomi rentan.

Persinggungan tersebut tampak ketika Bu Prani berkata
Ya sudah, Mbak, saya pesen lagi obatnya (Budi Pekerti, 2026),

Lalu membayar biaya pengobatan suaminya setelah petugas menyampaikan
Ini totalnya empat ratus ribu ya, Bu (Budi Pekerti, 2026).

Adegan ini ditunjukkan bahwa Bu Prani memikul tanggung jawab sebagai istri, pengelola keuangan, pembiaya layanan kesehatan, sekaligus pekerja perawatan. Perspektif *structural intersectionality* menjelaskan bahwa gender, kondisi ekonomi, akses kesehatan, pekerjaan, dan posisi keluarga saling memperkuat kerentanan perempuan sehingga pilihan Bu Prani dibatasi oleh kebutuhan membiayai pengobatan, rumah tangga, tempat tinggal, dan pekerjaannya. Diskursus moral berbasis gender menempatkan perempuan dalam etika kepedulian yang mengharuskan mereka mendahulukan kebutuhan keluarga. Akibatnya, persoalan struktural seperti akses layanan kesehatan dan keterbatasan ekonomi bergeser menjadi tanggung jawab moral perempuan.

Kerentanan kelas sosial juga tampak ketika pemilik kontrakan mengingatkan
Pembayaran sudah telat dua bulan. Maksud saya, apakah tahun depan akan diperpanjang lagi apa nggak, Bu? (Budi Pekerti, 2026).

Kelas sosial ditentukan akses terhadap tempat tinggal, rasa aman, dan posisi tawar keluarga sehingga Bu Prani berada pada posisi yang bergantung pada pemilik sumber daya. Dalam perspektif interseksional, kelas sosial bukan sekadar latar ekonomi, tetapi struktur yang membatasi pilihan perempuan sekaligus menuntut mereka tetap tenang, bertanggung jawab, dan mampu menjaga martabat keluarga. Perempuan dari kelas sosial menengah ke bawah menghadapi

kerentanan berlapis akibat keterbatasan sumber daya, perlindungan sosial, dan relasi kuasa patriarkal (Homan, 2021). Akibatnya, kegagalan ekonomi yang bersifat struktural berpotensi ditafsirkan sebagai kegagalan moral pribadi (Inglis, *et al.*, 2023). Film *Budi Pekerti* diperlihatkan bahwa meskipun Bu Prani tampil sebagai perempuan yang tegas, profesional, dan bertanggung jawab, agensinya tetap dibatasi oleh sistem patriarki yang mengubah ketegasan menjadi agresivitas, kepedulian menjadi kewajiban, dan keterbatasan ekonomi menjadi ukuran moral. Diskriminasi terhadap perempuan dengan demikian bekerja melalui pembagian tanggung jawab yang timpang, standar moral ganda, stereotip gender, pengawasan sosial, dan keputusan institusional yang tampak netral.

Ketidakadilan yang dialami Bu Prani juga lahir dari persinggungan gender, kelas sosial, profesi guru, posisi sebagai istri dan ibu, serta relasi kuasa dalam keluarga, masyarakat, media digital, dan institusi pendidikan. Crenshaw menegaskan bahwa interseksionalitas merupakan kerangka analitis untuk menjelaskan bagaimana berbagai sistem dominasi beririsan dan menghasilkan pengalaman diskriminasi yang tidak dapat dipahami melalui satu kategori identitas saja (Crenshaw, 2010). Posisi Bu Prani memperlihatkan bentuk *overlapping oppression* karena setiap identitas yang disandangnya membawa tuntutan berbeda yang secara bersama-sama mempersempit ruang pilihannya. Sebagai perempuan ia dituntut lembut, sebagai guru ia wajib menjadi teladan moral, sebagai istri dan ibu ia memikul tanggung jawab utama terhadap keluarga; sedangkan sebagai anggota kelas sosial rentan ia memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan perlindungan institusional (Crenshaw, 2010). Kerangka interseksional ditunjukkan bahwa *structural intersectionality* menjelaskan kerentanan yang lahir dari kondisi ekonomi, pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan institusi, *political intersectionality* menjelaskan keterbatasan kebijakan yang hanya mempertimbangkan satu identitas, sedangkan *representational intersectionality* menjelaskan bagaimana media, bahasa, dan budaya populer membentuk stereotip yang diterima sebagai kebenaran sosial.

Kerentanan tersebut terlihat ketika Bu Prani aktif memantau perkembangan kesehatan suaminya dengan bertanya

Kalau menurut Bu Tunggal sendiri, perkembangan Pak Didik bagaimana, Mbak? (Budi Pekerti, 2026).

Kemudian, menerima penjelasan bahwa pengobatan serta konseling harus terus dilanjutkan. Adegan ini ditunjukkan bahwa tanggung jawab perawatan keluarga tidak hanya berupa pekerjaan fisik, tetapi juga mencakup pengelolaan informasi medis, pengambilan keputusan, pemantauan terapi, dan dukungan emosional. Menurut Crenshaw (2010), kondisi tersebut dicerminkan *structural intersectionality* karena gender, ekonomi, akses kesehatan, dan posisi keluarga saling beririsan membentuk kerentanan perempuan. Etika kepedulian berbasis gender mengharuskan perempuan mendahulukan kebutuhan keluarga sehingga beban ekonomi sekaligus berubah menjadi beban moral. Ketika Bu Prani mampu memenuhi kebutuhan pengobatan, tindakannya dianggap sebagai kewajiban yang wajar. Sebaliknya, kegagalan memenuhi kebutuhan tersebut berisiko dipandang sebagai kegagalan seorang istri.

Kelas sosial semakin mempersempit pilihan Bu Prani karena keberlangsungan tempat tinggal dan stabilitas keluarganya bergantung pada kemampuan ekonomi. Perempuan dari kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah menghadapi kerentanan berlapis akibat persinggungan keterbatasan sumber daya, gender, dan relasi kuasa. Dalam perspektif feminisme interseksional, kondisi tersebut tidak hanya membatasi akses perempuan terhadap sumber daya, tetapi juga meningkatkan pengawasan moral terhadap perilaku dan kemampuannya mengelola rumah tangga. Kate Millett menjelaskan bahwa patriarki mempertahankan kontrol melalui norma budaya yang mengatur perilaku dan legitimasi perempuan di ruang publik maupun privat (Dabaghi, *et al.*, 2023). Crenshaw menegaskan bahwa dampak patriarki selalu dipengaruhi oleh persinggungan kelas sosial, profesi, kondisi ekonomi, posisi keluarga, dan struktur kelembagaan sehingga pengalaman diskriminasi perempuan hanya dapat dipahami melalui perspektif interseksional (Crenshaw, 2010). Oleh karena itu, hilangnya kesempatan profesional, *victim blaming*, tekanan psikologis, penghukuman sosial, dan lemahnya perlindungan institusional terhadap Bu Prani merupakan manifestasi patriarki interseksional yang membatasi ruang pilihan, mengurangi otoritas, mempersempit akses terhadap jabatan, dan melemahkan legitimasi perempuan dalam kehidupan sosial maupun profesional.

Diskriminasi Berlapis melalui Persinggungan Gender, Kelas Sosial, dan Profesi Guru

Diskriminasi yang dialami Bu Prani dalam film *Budi Pekerti* merupakan bentuk ketidakadilan berlapis yang lahir dari persinggungan gender, kelas sosial, profesi guru, kondisi ekonomi, dan posisinya sebagai istri dan ibu. Pengalaman tersebut tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan satu identitas. Perspektif interseksionalitas menegaskan bahwa posisi sosial perempuan dibentuk oleh pertemuan berbagai struktur kekuasaan yang bekerja secara simultan. Gender, kelas, pekerjaan, keluarga, institusi, dan representasi publik saling berhubungan sehingga menghasilkan bentuk kerentanan yang khas dan kompleks (Fasang & Aisenbrey, 2022). Selanjutnya, Kimberlé Crenshaw mengembangkan interseksionalitas bukan sekadar sebagai teori mengenai keberagaman identitas, tetapi sebagai kerangka analitis untuk memahami cara berbagai sistem dominasi saling beririsan. Pendekatan ini mengkritik analisis diskriminasi yang hanya menggunakan satu kategori, seperti gender, tanpa memperhitungkan kelas sosial, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan posisi kelembagaan. Dalam pengalaman Bu Prani, diskriminasi terbentuk melalui *overlapping oppression*, yaitu pertemuan sejumlah posisi sosial dan mekanisme penindasan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Persoalan yang dialaminya bukan hanya akibat dirinya sebagai perempuan, tetapi juga karena ia merupakan guru, istri, ibu, pencari nafkah, pekerja perawatan, dan anggota keluarga dengan kondisi ekonomi rentan.

Persinggungan pertama terlihat melalui hubungan antara gender, kondisi ekonomi, dan tanggung jawab perawatan keluarga. Bu Prani menyampaikan:

Bu Prani : Ya sudah, Mbak, saya pesen lagi obatnya.
Petugas : Ini totalnya empat ratus ribu ya, Bu.
Bu Prani : Saya transfer ya, Mbak (Budi Pekerti, 2026).

Bu Prani menjadi pihak yang bertanggung jawab memastikan keberlanjutan pengobatan suaminya. Ia tidak hanya berperan sebagai istri, tetapi juga sebagai pengelola keuangan, pembiaya layanan kesehatan, dan pekerja perawatan. Dari perspektif feminisme, pembagian tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan perawatan dalam keluarga lebih banyak dibebankan kepada perempuan dan dinormalisasi sebagai kewajiban moral.

Konsep *structural intersectionality* dijelaskan bahwa gender, kondisi ekonomi, akses pelayanan kesehatan, pekerjaan, dan posisi keluarga dapat saling memperkuat kerentanan perempuan. Keterbatasan ekonomi tidak hanya mengurangi kemampuan Bu Prani memenuhi kebutuhan material, tetapi juga mempersempit ruang pilihannya. Ia harus menyeimbangkan biaya pengobatan, kebutuhan rumah tangga, pembayaran tempat tinggal, dan keberlanjutan pekerjaan. Pilihan tersebut tidak sepenuhnya lahir dari kebebasan individual, tetapi dibentuk oleh keterbatasan sumber daya dan tanggung jawab gender yang bekerja secara bersamaan.

Diskursus moral berbasis gender sering menempatkan perempuan dalam etika kepedulian. Perempuan dianggap bermoral apabila bersedia mendahulukan kebutuhan suami, anak, dan keluarga daripada kepentingannya sendiri. Pengorbanan perempuan kemudian dipandang sebagai sifat alamiah, bukan sebagai konsekuensi pembagian kerja yang tidak setara. Dalam konteks ini, tindakan Bu Prani membiayai pengobatan suaminya memperlihatkan bagaimana moralitas perempuan dibentuk melalui tuntutan untuk merawat, bertanggung jawab, dan mempertahankan keberlangsungan keluarga.

Kondisi tersebut juga ditunjukkan bahwa masalah kesehatan tidak hanya bersifat medis, tetapi terkait dengan struktur ekonomi dan gender. Akses terhadap layanan kesehatan bergantung pada kemampuan finansial, sedangkan tanggung jawab untuk memastikan akses tersebut lebih banyak dibebankan kepada Bu Prani. Ketika kebutuhan kesehatan suaminya berbenturan dengan kebutuhan keluarga lainnya, Bu Prani tetap diposisikan sebagai pihak yang harus menemukan solusi. Dengan demikian, persoalan struktural dialihkan menjadi tanggung jawab individual perempuan.

Kerentanan kelas sosial terlihat semakin kuat melalui ketidakpastian tempat tinggal keluarga Bu Prani. Pemilik kontrakan menyampaikan

Pemilik kontrakan	: Pembayaran sudah telat dua bulan. Maksud saya, apakah tahun depan akan diperpanjang lagi apa nggak, Bu?
Bu Prani	: Masih kok, Pak, kita juga mau beli (Budi Pekerti, 2026).

Kelas sosial menentukan akses terhadap tempat tinggal, rasa aman, dan posisi tawar keluarga. Pemilik kontrakan memiliki kekuasaan atas keberlanjutan tempat tinggal, sedangkan Bu Prani berada dalam posisi yang bergantung pada keputusan pemilik sumber daya. Ketimpangan tersebut diperlihatkan bahwa ruang domestik tidak sepenuhnya menjadi ruang aman bagi perempuan karena keberlangsungannya tetap ditentukan oleh struktur ekonomi di luar keluarga.

Dalam perspektif interseksional, kelas sosial bukan sekadar kondisi latar, tetapi struktur yang membentuk kemampuan perempuan dalam menghadapi tekanan. Perempuan dari kelas sosial rentan memiliki pilihan yang lebih terbatas, tetapi tetap dituntut mengelola keterbatasan tersebut

dengan tenang, sopan, dan bertanggung jawab. Kesulitan ekonomi keluarga dapat berubah menjadi ukuran moral perempuan karena ia dianggap sebagai pengelola utama rumah tangga.

Perempuan kelas menengah ke bawah menghadapi kerentanan berlapis akibat keterbatasan sumber daya, perlindungan sosial, dan relasi kuasa patriarkal. Kelas sosial mempersempit alternatif tindakan, sedangkan norma gender membatasi cara perempuan dapat mengekspresikan kecemasan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Perempuan tetap dituntut menjaga citra sebagai sosok yang tenang dan mampu mengendalikan keadaan meskipun menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Persinggungan antara kelas sosial dan gender dengan demikian menghasilkan beban ganda. Bu Prani tidak hanya menghadapi keterbatasan material, tetapi juga harus mempertahankan martabat, ketenangan, dan citra sebagai perempuan yang mampu mengelola keluarga. Kegagalan ekonomi yang bersifat struktural berisiko ditafsirkan sebagai kegagalan moral pribadi. Situasi tersebut diperlihatkan bagaimana ketimpangan kelas dapat memperkuat pengawasan terhadap perempuan.

Film *Budi Pekerti* diperlihatkan bahwa perempuan dapat menjadi subjek yang aktif, tegas, profesional, dan bertanggung jawab, tetapi agensinya tetap berlangsung dalam struktur yang membatasi pemaknaan terhadap tindakannya. Ketegasan dapat ditafsirkan sebagai agresivitas, kepedulian berubah menjadi kewajiban, kompetensi profesional digunakan untuk memperbesar tanggung jawab domestik, dan keterbatasan ekonomi diubah menjadi kegagalan moral personal. Makna feminis yang dihasilkan adalah bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak selalu hadir melalui larangan langsung. Diskriminasi dapat bekerja melalui pembagian tanggung jawab yang tidak seimbang, tuntutan pengorbanan, standar moral ganda, stereotip gender, pengawasan sosial, dan keputusan institusional yang tampak netral. Seluruh mekanisme tersebut membentuk sistem patriarki interseksional yang mengawasi, membatasi, dan mengurangi legitimasi perempuan.

Ketidakadilan Interseksional dalam Representasi Moral Tokoh Perempuan

Ketidakadilan yang dialami Bu Prani dalam film *Budi Pekerti* merupakan hasil persinggungan gender, kelas sosial, profesi guru, posisi sebagai istri dan ibu, serta relasi kuasa dalam keluarga, masyarakat, media digital, dan institusi pendidikan. Perspektif interseksionalitas Crenshaw menegaskan bahwa pengalaman tersebut tidak dapat dijelaskan melalui satu kategori identitas karena berbagai sistem dominasi bekerja secara simultan dan menghasilkan bentuk diskriminasi yang khas (Crenshaw, 2010). Bu Prani mengalami *overlapping oppression* karena dinilai secara bersamaan sebagai perempuan, guru, istri, ibu, pencari nafkah, pengelola rumah tangga, dan anggota kelas sosial rentan. Setiap identitas membawa tuntutan yang berbeda sehingga mempersempit ruang pilihannya, sebagai perempuan ia dituntut lembut dan mampu mengendalikan emosi, sebagai guru ia wajib menjadi teladan moral, sebagai istri dan ibu ia memikul tanggung jawab utama terhadap keluarga; sedangkan keterbatasan kelas sosial membatasi aksesnya terhadap sumber daya ekonomi dan perlindungan institusional. Kerangka interseksional dijelaskan bahwa *structural intersectionality* membentuk kerentanan melalui kondisi ekonomi, pekerjaan, pendidikan, layanan publik, dan akses kesehatan, *political intersectionality* menunjukkan keterbatasan kebijakan yang hanya mempertimbangkan satu

identitas, sedangkan *representational intersectionality* dijelaskan bagaimana media dan budaya populer membentuk stereotip yang kemudian diterima sebagai kebenaran sosial.

Kerentanan tersebut tampak ketika Bu Prani bertanya

Kalau menurut Bu Tunggul sendiri, perkembangan Pak Didik bagaimana, Mbak? (Budi Pekerti, 2026).

Kemudian, menerima penjelasan bahwa suaminya harus terus menjalani pengobatan dan konseling. Adegan ini ditunjukkan bahwa Bu Prani tidak hanya melakukan pekerjaan perawatan secara fisik, tetapi juga mengelola informasi medis, mengambil keputusan, memantau pengobatan, dan memberikan dukungan emosional. Menurut Crenshaw (2010), kondisi tersebut dicerminkan *structural intersectionality* karena gender, kondisi ekonomi, akses kesehatan, dan posisi keluarga saling beririsan membentuk kerentanan perempuan. Diskursus moral berbasis gender menempatkan perempuan dalam etika kepedulian yang mengharuskan mereka mengutamakan kebutuhan keluarga. Akibatnya, beban ekonomi sekaligus berubah menjadi beban moral karena keberhasilan memenuhi kebutuhan pengobatan dipandang sebagai kewajiban seorang istri, sedangkan kegagalannya berisiko dianggap sebagai kegagalan moral perempuan.

Kelas sosial semakin mempersempit ruang pilihan Bu Prani karena keberlanjutan tempat tinggal dan stabilitas keluarganya bergantung pada kemampuan ekonomi. Perempuan dari kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah menghadapi kerentanan berlapis akibat keterbatasan sumber daya yang beririsan dengan gender dan relasi kuasa. Dalam perspektif feminisme interseksional, kelas sosial bukan sekadar latar ekonomi, tetapi struktur yang memengaruhi kemampuan perempuan mempertahankan martabat, mengelola rumah tangga, dan menghadapi tekanan, sekaligus meningkatkan pengawasan moral terhadap dirinya.

Kate Millett menjelaskan bahwa patriarki mempertahankan kontrol melalui norma budaya yang mengatur perilaku, suara, dan legitimasi perempuan di ruang publik maupun privat (Dabaghi, *et al.*, 2023). Crenshaw menegaskan bahwa dampak patriarki selalu dipengaruhi oleh persinggungan kelas sosial, profesi, kondisi ekonomi, posisi keluarga, dan struktur kelembagaan sehingga pengalaman diskriminasi hanya dapat dipahami melalui perspektif interseksional (Crenshaw, 2010). Oleh karena itu, hilangnya kesempatan profesional, *victim blaming*, tekanan psikologis, penghukuman sosial, dan lemahnya perlindungan institusional terhadap Bu Prani merupakan manifestasi patriarki interseksional yang membatasi ruang pilihan, mengurangi otoritas, mempersempit akses terhadap jabatan, serta melemahkan legitimasi perempuan dalam kehidupan sosial dan profesional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap representasi moral perempuan dalam teks film *Budi Pekerti* karya Wregas Bhanuteja, penelitian ini dihasilkan tiga simpulan utama yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut

1. moralitas Bu Prani dalam film *Budi Pekerti* tidak direpresentasikan sebagai karakter personal, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh patriarki, kelas sosial,

profesi guru, media digital, dan relasi kuasa. Sebagai perempuan, ia dituntut selalu sabar, mampu mengendalikan emosi, menjaga kehormatan, dan menjadi teladan moral, sementara keterbatasan ekonomi serta profesinya semakin mempersempit ruang gerak dan memperkuat ekspektasi terhadap perilaku ideal;

2. pengawasan terhadap Bu Prani berlangsung melalui mekanisme kelembagaan, evaluasi profesional, tekanan keluarga, dan penghakiman publik yang dipicu oleh penyebaran potongan video di media sosial. Relasi kuasa tersebut menjadikan ekspresi, suara, dan emosi perempuan sebagai objek penilaian kolektif, sementara institusi pendidikan lebih mengutamakan perlindungan reputasi organisasi daripada perlindungan individu. Akibatnya, moralitas berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku, membatasi ruang profesional, dan mempertahankan nilai-nilai patriarki melalui mekanisme yang tampak objektif; dan
3. pengalaman Bu Prani tidak dapat dijelaskan hanya melalui identitas gender, tetapi merupakan hasil persinggungan berbagai posisi sosial yang melahirkan standar moral ganda, *victim blaming*, pengawasan psikologis, delegitimasi profesional, pembatasan kesempatan karier, dan penghakiman publik yang lebih berat dibandingkan tokoh laki-laki. Temuan ini ditegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan produk interaksi patriarki, kelas sosial, profesi, media digital, dan struktur kelembagaan yang bekerja secara bersamaan. *Budi Pekerti* direpresentasikan moralitas perempuan sebagai arena interseksional tempat berbagai sistem kekuasaan saling berkelindan dalam membentuk, mengawasi, dan mempertahankan ketidakadilan terhadap perempuan.

penelitian merekomendasikan kebijakan pendidikan yang adil tanpa bias gender, mendorong penilaian publik berbasis interseksionalitas Crenshaw, dan menjadi referensi penelitian lanjutan mengenai representasi patriarki dalam film dan media.

DAFTAR RUJUKAN

- Aldossari, Maryam., & Chaudhry, Sara. (2024). Gendered Precarity in Saudi Arabia: Examining the State Policies and Patriarchal Culture in the Labor Market. *Gender Work and Organization*, 31(6), 2698–2716. <https://doi.org/10.1111/gwao.13119>
- Barker-Clarke, Emma. (2023). Girls Navigating the Context of Unwanted Dick Pics: ‘Some Things Just Can’t Be Unseen.’ *Youth*, 3(3), 935–953. <https://doi.org/10.3390/youth3030060>
- Bixby, Laurin E. (2024). Intersectional Inequalities: How Socioeconomic Well-Being Varies at the Intersection of Disability, Gender, Race-Ethnicity, and Age. *Research in Social Stratification and Mobility*, 91, 100938. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2024.100938>

- Brünig, Lisa., Kahrass, Hannes., & Salloch, Sabine. (2024). The Concept of Intersectionality in Bioethics: A Systematic Review. *BMC Medical Ethics*, 25(1), 64. <https://doi.org/10.1186/s12910-024-01057-5>
- Budi Pekerti. (2026). *Transkrip Film Budi Pekerti*. https://drive.google.com/drive/folders/1sTadJSaFjvyvPzrLb_W3acZDfKLLwsJ0?usp=sharing
- Capodivacca, Silvia. dan Giacomini, Gabriele. (2024). *Discipline and Power in the Digital Age : Critical Reflections from Foucault ' s Thought*. 36, 227–251. <https://doi.org/https://doi.org/10.22439/fs.i36.7215>
- Carpendale, Jeremy, et al. (2021). Conceptualizations of Knowledge in Structuring Approaches to Moral Development: A Process-Relational Approach. *Frontiers in Psychology*, 12, 756654. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.756654>
- Crenshaw, Kimberle. (2010). Mapping the Margins : Intersectionality , Identity Politics , and Violence Against Women of Color. *Stanford Law Review Mapping*, 43(6), 1241–1299. <https://negrasoulblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/04/mapping-the-margins-intersectionality-identity-politics-and-violence-against-women-of-color-kimberle-crenshaw1.pdf>
- Dabaghi, Nilofar., Amini-Rarani, Mostafa., & Nosratabadi, Mehdi. (2023). Investigating the Relationship Between Socioeconomic Status and Domestic Violence Against Women in Isfahan, Iran in 2021: A Cross-sectional Study. *Health Science Reports*, 6(5). <https://doi.org/10.1002/hsr2.1277>
- Esposito, Eleonora. (2024). Discourse, Intersectionality, Critique: Theory, Methods and Practice. *Critical Discourse Studies*, 21(5), 505–521. <https://doi.org/10.1080/17405904.2023.2230602>
- Farida, Brumadyadisty, dkk. (2025). Sex Workers Still Human? Reading Dehumanization in Photo-Journalism. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 4(6), 2860–2874. <https://doi.org/https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i6.1674>
- Faruk. (2012). *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Pustaka Pelajar.

- Fasang, Annette Eva., & Aisenbrey, Silke. (2022). Uncovering Social Stratification: Intersectional Inequalities in Work and Family Life Courses by Gender and Race. *Social Forces*, 101(2), 575–605. <https://doi.org/10.1093/sf/soab151>
- Gowda, Manasa. (2024). The Portrayal of Women in Social Media: Implications for Social Work Practice. *Unisia*, 42(1), 311–344. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol42.iss1.art13>
- Gqola, Pumla Dineo, dkk. (2024). Gender and Public Space. *Gender & Development*, 32(1–2), 1–25. <https://doi.org/10.1080/13552074.2024.2376976>
- Homan, Patricia. (2021). Sexism and Health: Advancing Knowledge Through Structural and Intersectional Approaches. In *American journal of public health* (Vol. 111, Nomor 10, hal. 1725–1727). <https://doi.org/10.2105/AJPH.2021.306480>
- İlhan, Büşra. T., & Gündüz, Mustafa. (2022). The Reproduction of Inequality in Turkey: Power Distribution in a Primary Class*. *Power and Education*, 15(3), 309–325. <https://doi.org/10.1177/17577438221132245>
- Inglis, Greig, et al. (2023). Poverty stigma, mental health, and well-being: A rapid review and synthesis of quantitative and qualitative research. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 33(4), 783–806. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/casp.2677>
- Krisprimandoyo, Denpharanto Agung, et al. (2024). Exploring the Relationship between Social Media Engagement, Customer Reviews, and Brand Perceptions: A Comprehensive Study in Retail Industry. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(2), 1584–1591. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.597>
- Müller, Günter., & Müller, Timo. D. (2023). (Patho)Physiology of Glycosylphosphatidylinositol-Anchored Proteins II: Intercellular Transfer of Matter (Inheritance?) That Matters. *Biomolecules*, 13(6), 994. <https://doi.org/10.3390/biom13060994>
- Rudan, Paola., & Battistini, Matteo. (2023). For bell hooks: “White-Supremacist Capitalist Patriarchy” and “Feminism is for Everybody” in U.S. History and Politics. *USAbroad – Journal of American History and Politics*, 6(1 SE-), I–IV. <https://doi.org/10.6092/issn.2611-2752/16500>

Sabik, Natalie J. (2021). The Intersectionality Toolbox: A Resource for Teaching and Applying an Intersectional Lens in Public Health. *Frontiers in Public Health*, Volume 9-2021. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.772301>

Sufa, Siska Armawati, dkk.(2020). Sidoarjo Film Festival 2019 as an Effort to Generate the Indonesian Film Industry. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 423(Imc 2019), 411–423. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200325.032>

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

“Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu kecerdasan buatan/*artificial intelligence* (AI) secara terbatas yaitu, Sciteai untuk membantu pencarian sumber literatur yang relevan sebagai referensi dan sitasi penelitian. Penggunaan alat bantu AI dalam penelitian ini telah disesuaikan oleh peneliti dengan ketentuan COPE (*Committee on Publication Ethics*).”

TENTANG PENULIS

Leyla Aufa Nasywa Bobsaid: Mahasiswa S1 Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email Penulis Koresponden: leyla.22093@mhs.unesa.ac.id

Ririe Rengganis: Dosen S1 Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: ririerengganis@unesa.ac.id